

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Dalam perencanaan jangka pendek, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan dokumen RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Jember yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan ekonomis harus didasari dengan perencanaan. Perencanaan di daerah harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adanya sistem tersebut meliputi RPJP, RPJM, Renstra PERANGKAT DAERAH, RKPD sebagai acuan Renja PERANGKAT DAERAH. Rencana pembangunan tersebut merupakan pedoman untuk penyusunan RAPBD sampai dengan APBD Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Misi dan arah kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Jember.

Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jember, dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM wajib menyusun Renstra PERANGKAT DAERAH yang dijabarkan menjadi rencana kerja PERANGKAT DAERAH. Rencana pembangunan itu adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah bagi Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yaitu berupa inti-inti dan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Tahun 2026 ini merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Kerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan pula dengan penerapan sitem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan legitimate.

Dengan telah ditetapkannya tema Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025 yaitu pada Rancangan RKPD Tahun 2025 yaitu “ **Penguatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Sdm, Infrastruktur Dan Investasi Daerah Yang Berkelanjutan** “. Kecamatan Semboro Kabupaten Jember berkewajiban untuk mendukung terlaksananya Tema tersebut, terlebih untuk ikut mensukseskan Program Keberlanjutan Kecamatan Semboro, sebagaimana Prioritas Pembangunan ke 7 yaitu **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi**. Dalam hal ini Kecamatan Sembor fokus kepada Pelayanan Publik melalui penggunaan teknologi.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semboro Tahun 2025 ini berawal dari Pembahasan Program dan Kegiatan yang dirasa penting dan perlu serta berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk mendukung Kegiatan Propinsi dan Kementrian serta untuk dapatnya mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Semboro. Pembahasan dilakukan oleh Tim dari Sekretariat bersama dengan Kasi (Kasi PMKS, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, dan Kasi Tratibum) dan Kasubag yang ada (Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan) sehingga kemudian tersusunlah Rencana Kerja Tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/200/II/Bangda Tanggal 28 Februari 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah :

1. Untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan di Kecamatan Semboro pada Tahun 2026 yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten pada Tahun 2026, yang merupakan bagian integral serta tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Periode 2021-2026;
2. Untuk menetapkan standar pengukuran kinerja di Kecamatan Semboro pada Tahun 2026 ;
3. Untuk menetapkan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan pada Tahun 2026;
4. Untuk Memenuhi indikator sasaran pada RPJMD 2016 – 2021;
5. Untuk memenuhi Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah :

1. Sebagai media informasi dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan oleh Kecamatan Semboro;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2026;

3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (n-2) dan Tahun 2025 (n-1) merupakan bahan perbandingan dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun mendatang, perlu kiranya digambarkan tingkat capaian kinerja baik program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui segala kekurangan dan kelebihan untuk perbaikan selanjutnya.

Adapun capaian program dan kegiatan selama tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024

Program / Kegiatan		Volume	Kinerja Keuangan		
			Anggaran	Realisasi	Persentase
1		2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2.997.662.270	2.339.333.710	78,04%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.570.000	1.170.000	74,52%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.570.000	1.170.000	74,52%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.703.846.570	2.070.453.430	76,57%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2.578.267.570	1.949.784.430	75,62%
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	124.800.000	120.090.000	96,23%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	779.000	579.000	74,33%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	62.458.600	55.567.400	88,97%
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	27.507.700	24.350.000	88,52%
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	34.950.900	31.217.400	89,32%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.921.300	117.393.912	89,67%
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	37.476.000	26.068.912	69,56%

1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	93.445.300	91.325.000	97,73%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.865.800	94.748.968	95,84%
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	37.786.400	35.284.968	93,38%
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	8.286.400	16.700.000	91,32%
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	42.793.000	42.764.000	99,93%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	604.720.000	600.350.000	99,28%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	549.850.000	549.600.000	99,95%
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan	549.850.000	549.600.000	99,95%
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	54.870.000	50.750.000	92,49%
2.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 bulan	54.870.000	50.750.000	92,49%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	40.318.100	39.345.000	97,59%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	40.318.100	39.345.000	97,59%
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	5.550.000	5.550.000	100,00 %
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	34.768.100	33.795.000	97,20%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	375.451.600	367.850.000	97,98%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	375.451.600	367.850.000	97,98%
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	375.451.600	367.850.000	97,98%
			4.018.151.970	3.346.878.710	83,29%

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara keseluruhan Program/Kegiatan Kecamatan Semboro pada tahun 2024 berjalan dengan baik sehingga tidak terdapat Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada umumnya capaian kinerja semua program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA**
- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
 PUBLIK**

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program/Kegiatan Kecamatan Semboro pada tahun 2024 tidak terdapat hasil yang melebihi target hasil/keluaran yang telah ditentukan meskipun terdapat 3 sub kegiatan yang melebihi target. Terdapat program/kegiatan yang belum mencapai target disebabkan program/kegiatan tersebut masih berjalan dan belum secara keseluruhan terlaksana.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian program adalah 100% dari target sebesar 100% pada tahun 2024. Kegiatan yang mendukung program antara lain :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tingkat realisasi target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 75% dari target sebesar 100% atau 12 laporan. Pada tahun 2024

masih berjalan dari terdapat 3 bulan yang belum direalisasikan. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian sebesar 76% dari target 100%. Penyebab tidak tercapainya target karena terdapat 3 ASN yang pensiun pada tahun 2024 dari 16 ASN menjadi 13 ASN.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian 8 laporan dari 1 laporan yang ditargetkan pada tahun 2024.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tingkat realisasi target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah 0% dari target 100% pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan masih belum terlaksana pada tahun 2024. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan capaian 0 dari 1 paket yang ditargetkan pada tahun 2024.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tingkat realisasi target Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah 8% atau 1 laporan dari target pada tahun 2024 sebesar 100% atau 12 laporan. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja kegiatan ini adalah :

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 0 paket dari 1 target yang ditargetkan pada tahun 2024, hal ini disebabkan belum dilaksanakannya penggantian peralatan listrik dan lampu penerangan di kantor.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 50% atau 1 paket dari 100% atau 2 paket yang ditargetkan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena belanja modal yang pada awalnya ditargetkan 2 paket dan hanya bisa dilaksanakan 1 paket.
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 0% atau 0 paket dari 1 paket yang ditargetkan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan masih berjalannya tahun anggaran 2024 dan pemenuhan logistik belum mencapai 100% sehingga belum bisa dikatakan 1 paket.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat realisasi target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar 67% atau 8 laporan dari target sebesar 100% atau 12 laporan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat 1 sub kegiatan yang masih berjalan dan 1 sub kegiatan yang

belum dilaksanakan. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target pada kegiatan ini adalah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan capaian 67% atau 8 laporan dari target sebesar 100% atau 12 laporan. Hal ini disebabkan karena tahun anggaran 2024 masih berjalan dan belum dilaksanakan secara keseluruhan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 0% atau 0 laporan dari target sebesar 100% atau 1 laporan. Hal ini karena belum dilaksanakannya sub kegiatan ini.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tingkat realisasi target Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 67% atau 8 laporan dari target sebesar 100% atau 12 laporan. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan ini adalah :
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian 0% atau 0 unit dari target sebesar 100% atau 1 unit. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2024 masih berjalan sehingga belum bisa dikategorikan terpenuhi secara keseluruhan pemeliharaan mobil jabatan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 0% atau 0 unit dari target sebesar 100% atau 1 unit. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2024 masih berjalan sehingga belum bisa dikategorikan terpenuhi secara keseluruhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 0% atau 0 unit dari target sebesar 100% atau 1 unit. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2024 masih belum dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan gedung kantor.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian program adalah 71% dari target sebesar 100% pada tahun 2024. Kegiatan yang mendukung program antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Tingkat realisasi target Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar 75% dari target sebesar 100%. Hal ini disebabkan sub kegiatan yang mendukung masih belum

mencapai 100%. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan ini adalah :

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan capaian sebesar 75% atau 9 laporan dari target sebesar 100% atau 12 laporan. Hal ini disebabkan karena belum secara keseluruhan dilaksanakannya pada tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Tingkat realisasi kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sebesar 67% dari target sebesar 100%. Hal ini disebabkan sub kegiatan yang mendukung masih belum mencapai 100%. Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan ini adalah :

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan dengan capaian sebesar 67% atau 8 laporan dari target sebesar 100% atau 12 laporan. Hal ini disebabkan karena belum secara keseluruhan dilaksanakannya pada tahun 2024

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian program adalah 88% dari target sebesar 100% pada tahun 2024. Kegiatan yang mendukung program antara lain :

- Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan capaian target 100% atau 7 lembaga dari target 100% atau 1 lembaga. Realisasi target melebihi target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena pada awal perencanaan hanya akan mengundang 1 unsur lembaga, akan tetapi pada saat pelaksanaan mengundang 7 unsur kelembagaan.
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian target 75% atau 9 laporan dari target 100% atau 12 laporan. Hal ini disebabkan karena belum secara keseluruhan dilaksanakannya pada tahun 2024

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian program adalah 88% dari target sebesar 100% pada tahun 2024. Kegiatan yang mendukung program antara lain :

- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan capaian target sebesar 67% atau 8 laporan dari target 100% atau 12 laporan. Hal ini

disebabkan karena belum secara keseluruhan dilaksanakannya pada tahun 2024.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Semboro tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Jember pada umumnya
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Semboro
- Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semboro
- Terjaganya ketertiban umum dan ketertraman masyarakat di Kecamatan Semboro.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari faktor-faktor penyebab yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditentukan, hal ini memerlukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran dalam meningkatkan pencapaian target. Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil antara lain :

- Perencanaan program/kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditentukan di rencana strategis Kecamatan Semboro dan disesuaikan dengan kondisi pada tahun perencanaan dan penganggaran.
- Penganggaran diprioritaskan pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 (T-C.29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
					n-3	n-2	n-2		n-1	n-1
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7										
7	01									
7	01	01								
7	1	1								
7	01	01	02.02							
7	01	01	02.02	0001						
7	01	01	02.02	0003						
7	01	01	02.05							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
					n-3	n-2	n-2		n-1	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 01 01 02.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	4	0	1	0	0%	1	1	25%
7 01 01 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	48	24	12	1	8%	12	37	77%
7 01 01 02.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	0	1	0	0%	1	1	25%
7 01 01 02.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	2	1	50%	1	6	100%
7 01 01 02.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	0	1	0	0%	1	1	25%
7 01 01 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	24	12	8	67%	12	44	92%
7 01 01 02.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	48	0	12	8	67%	12	20	42%
7 01 01 02.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48	0	1	0	0%	12	12	25%
7 01 01 02.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	2	12	8	67%	12	22	46%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
					n-3	n-2	n-2		n-1	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 01 01 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	24	12	8	67%	12	44	92%
7 01 01 02.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	0	0%	1	1	100%
7 01 01 02.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	1	0	0%	1	1	100%
7 01 01 02.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	1	1	0	0%	2	2	100%
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100	100	100	71	71%	100	100	100%
7 01 02 02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	75	75%	100	100	100%
7 01 02 02.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48	24	12	9	75%	12	45	94%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
								Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
								n-2	n-2			n-1	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7 01 02 02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	67	67%	100	100	100%
7 01 02 02.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	24	12	8	67%	12	44	92%
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	100	100	100	88	88%	100	100	100%
7 01 03 02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	88	88%	100	100	100%
7 01 03 02.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	2	1	7	100%	7	16	100%
7 01 03 02.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	24	12	9	75%	12	45	94%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100	100	100	67	67%	100	100	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
									n-3	n-2	n-2		n-1	n-1
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	100	100	100	67	67%	100	100	100%
7	01	04	02.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	12	8	67%	12	32	100%

